

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 25

Kades Dilibatkan Tangani Tunggakan Pajak Kendaraan

DEMAK - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Demak, melibatkan pemerintah desa dalam penanganan wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak.

Melalui pelibatan mereka, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan untuk memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga penda-

patan asli daerah pun bertambah.

Kasi Retribusi dan Tunggakan pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Demak, Tyas Utami menuturkan tunggakan pajak kendaraan masih tergolong tinggi. Dia mencontohkan di wilayah Kecamatan Mijen, jumlah kendaraan roda dua menunggak pajak sebanyak 12.587

dengan nilai kewajiban pajak sebesar Rp 5,5 miliar lebih. Adapun kendaraan roda empat terdapat sebanyak 940 unit atau objek pajak dengan tunggakan Rp 2 miliar lebih.

"Untuk itu kami mengajak kepala desa dan perangkat desa ikut dalam menaikkan perolehan pajak," katanya, di sela sosialisasi Penanganan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (*door to door*) di Wilayah Kabupaten Demak, kemarin.

Kegiatan yang berlangsung di aula Kecamatan Mijen tersebut, dihadiri Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Demak Retno Pantja Indah Wijani, Kanit Regident Satlantas Polres Demak Iptu Margono, dan petugas Jasa Raharja, Pandu serta Kasi Tapem Kecamatan Mijen Purwanto.

Untuk Pembangunan

Sementara Retno Pantja Indah Wijani menambahkan, pendapatan asli daerah Pemprov Jateng, diperlukan untuk menunjang pembangunan daerah. Dana tersebut sebagian besar diperoleh dari pajak kendaraan bermotor.

"Sekitar 80 persen PAD Provinsi Jateng itu bersumber dari perolehan pajak kendaraan bermotor atau PKB.

Dari perolehan itu 30 persennya dikembalikan ke kabupaten/kota," katanya.

Tahun ini pihaknya menargetkan pendapatan sebesar Rp 107 miliar dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Rp 121 miliar dari BBNKB. Untuk memperoleh pajak sesuai target telah dilakukan sejumlah upaya berupa mendekati layanan kepada masyarakat.

Di antaranya melalui Samsat Online Paten, Samsat Keliling, Samsat CFD dan Samsat Malam. "Juga terdapat Samsat Sakpole atau sistem administrasi kendaraan pajak online yang berbasis android dan bisa diakses di mana pun," terangnya.

Diakui Retno, berbagai terobosan tersebut telah mampu menunjang peningkatan kesadaran pajak, tetapi masih terdapat wajib pajak yang menunggak.

Pihaknya memandang perlu dukungan kepala desa bersama perangkat desa untuk mengoptimalkan perolehan pajak, karena keterbatasan personel UPPD.

Terlebih mereka merupakan aparat lini terdepan yang mengetahui masyarakat di wilayahnya masing-masing. (H1-42)